



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa;
19. Masukan/*input* adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
20. Sasaran/target/*output* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
21. Hasil/*outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

22. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
23. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
24. Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke rekening Kas Daerah;
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah;
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah;
35. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
36. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
38. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
40. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.161.957.948.676,00 (*dua triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.135.308.226,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.746.342.060,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.118.634.167,00 (*dua ratus empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);
 - Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)
 - Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp44.625.000.000,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*);
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*); dan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp20.746.342.060,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp14.859.063.160,00 (*empat belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah*);
 - Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp4.363.278.900,00 (*empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*); dan
 - Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.524.000.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah*).

- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp214.118.634.167,00 (*dua ratus empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp375.600.000,00 (*tiga ratus tujuh lima juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp2.622.084.167,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp206.119.000.000,00 (*dua ratus enam miliar seratus sembilan belas juta rupiah*);
 - j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
 - k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*); dan
 - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.796.822.640.450,00 (*satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.645.744.640.450,00 (*satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.078.000.000,00 (*seratus lima puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.477.569.515.980,00 (*dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.860.142.494,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.857.616.991,00 (*lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.064.267.600,00 (*delapan puluh satu miliar enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.532.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam ratus dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu ratus enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.953.142.679,00 (*seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.064.131.513,00 (*seratus lima puluh delapan miliar enam puluh empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.970.419.153,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh ratus empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.506.244.196,00 (*satu miliar lima ratus enam ratus dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp999.672.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.521.000.000,00 (*enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu ratus rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar*

delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
 - m. Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp502.103.726.326,00 (*lima ratus dua miliar seratus tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.511.031.458,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.866.935.311,00 (*lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.398.929.770,00 (*tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.789.685.120,00 (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.683.295.120,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.909.967.550,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.377.227,00 (*sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.849.090.328,00

(tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp918.018.209,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.662.505.844,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.164.086.063,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).
- (14) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.857.616.991,00 (lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp111.869.540.267,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp172.175.359.026,00 (seratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp15.996.595.358,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp39.654.820.550,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp11.908.153.790,00 (sebelas miliar sembilan ratus delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.427.398.000,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp109.825.750.000,00 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.064.267.600,00 (*delapan puluh satu miliar enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.532.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp389.991.280.184,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) terdiri atas:
 - a. Tanah direncanakan sebesar Rp4.887.875.000,00 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp64.831.470.298,00 (*enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - c. Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp183.326.772.074,00 (*seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah*);
 - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp128.462.285.412,00 (*seratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*); dan
 - e. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 (*delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00 (*tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*) terdiri atas:
 - a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*); dan

b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp379.828.093.302,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp390.611.567.304,00 (*tiga ratus sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.861.567.304,00 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.750.000.000,00 (*seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sragen ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

14. Lampiran XIV Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 17

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

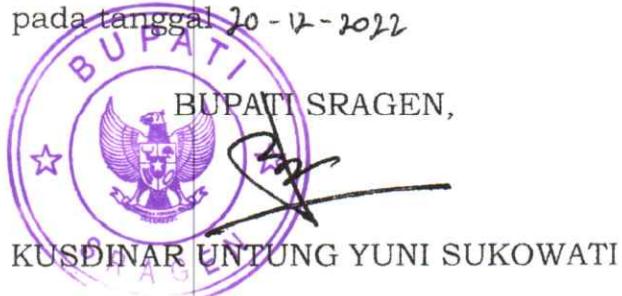
Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 - 12 - 2022



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 97

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365.135.308.226
4.1.01	Pajak Daerah	105.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	184.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	184.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	4.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	4.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	700.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	700.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.180.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.180.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	60.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	60.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	390.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	390.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	203.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	203.500.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.500.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	44.625.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.625.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.625.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	75.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.600.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.600.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.600.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	200.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	200.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	420.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	420.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	180.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	180.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	28.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	28.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	25.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	25.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.746.342.060
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.859.063.160
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	56.361.500
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	56.361.500
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.144.274.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.144.274.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	50.000.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	50.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.700.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.700.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.974.056.660
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	417.693.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.129.694.660
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.426.669.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	873.371.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	873.371.000
4.1.02.01.08	Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta	15.000.000
4.1.02.01.08.0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital	15.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	105.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	105.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	121.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	121.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	820.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	820.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.363.278.900
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	383.750.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi PenyeWAan Tanah dan Bangunan	342.500.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi PenyeWAan Tanah	15.250.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	26.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	382.790.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	382.790.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.549.488.900
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.549.488.900
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	65.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.982.250.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.982.250.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.524.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.520.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.520.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.270.331.999
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	25.270.331.999
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.270.331.999
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.270.331.999
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.118.634.167
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	375.600.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	370.500.000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	10.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	100.000.000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	260.500.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	5.100.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	5.100.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.622.084.167
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.590.084.167
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.590.084.167
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	32.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	32.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.000
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	5.000
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	5.000
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	15.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.000
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	5.000
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	5.000
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	5.000
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	5.000
4.1.04.12.14.0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	5.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	206.119.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	206.119.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	206.119.000.000
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	50.000
4.1.04.17.01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	50.000
4.1.04.17.01.0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	50.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.796.822.640.450
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.645.744.640.450
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.437.616.841.450
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.343.375.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.720.120.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.853.105.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.930.000.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	155.250.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.570.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	246.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	442.950.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.018.941.458.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.018.941.458.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.903.116.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.197.440.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.588.897.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.370.423.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	16.009.880.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.097.207.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.994.990.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.362.410.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.792.270.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	503.905.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.121.642.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.229.358.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	334.428.892.450
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	97.783.200.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.562.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	145.902.382.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.028.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	16.326.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.748.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	44.782.154.450
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.077.852.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	911.259.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	510.575.000
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	410.170.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.01.05	Dana Desa	208.127.799.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	208.127.799.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	208.127.799.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.078.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	150.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	150.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	42.500.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.500.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	194.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.806.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.078.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.078.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.078.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.161.957.948.676
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.692.860.142.494
5.1.01	Belanja Pegawai	1.055.906.257.903
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	653.891.648.362
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	502.103.726.362
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	408.403.875.953
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.699.850.409
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.511.031.458
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.484.670.908
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.026.360.550
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.866.935.311
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.866.935.311
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.398.929.770
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.998.929.770
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	400.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.789.685.120
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.506.371.050
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.283.314.070
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.683.295.120

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.012.055.362
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.671.239.758
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.909.967.550
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.765.922.788
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	144.044.762
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.377.227
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.934.356
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.442.871
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.849.090.328
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.809.277.535
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.039.812.793
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	918.018.209
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	878.620.745
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	39.397.464
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.662.505.844
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.554.729.213
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	107.776.631
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.164.086.063
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.580.325.371
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	583.760.692
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	24.000.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	24.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	145.953.142.679
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	63.826.409.356
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	62.159.540.556
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.666.868.800
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.450.383.576
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.450.383.576
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	37.158.658
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	37.158.658
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	80.639.191.089
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	78.086.246.460
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.552.944.629
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.064.131.513
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.823.093.750
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.400.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	148.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.700.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	22.200.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.639.968.750
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.775.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	59.200.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.600.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.029.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	881.250.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	860.655.763
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.169.918
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	149.084.037
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	1.900.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	62.450.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	241.452.814
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	30.624.784
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	570.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.800.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.399.773
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	27.570.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	101.378.358
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	12.737.415
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	54.399.265
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.502.500

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.554.600
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	302.299
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	95.760.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	145.902.382.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	145.902.382.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.028.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	6.028.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.450.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.450.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.970.419.153
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.446.380.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.446.380.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	142.299.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	142.299.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	151.701.795
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	151.701.795
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	102.193.875
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	102.193.875
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.707.974.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.707.974.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.100.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.100.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.965.200
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.965.200
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.070.300.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.070.300.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.123.465.579
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.123.465.579
5.1.01.04.10	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	99.821.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	99.821.200
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	601.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	601.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.316.736.704
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.080.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.356.704
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.500.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.196.800.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.536.880.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.536.880.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.506.244.196
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.681
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.681
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.543.104
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.543.104
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.009
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.009
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.461.200
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.461.200
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.066.906.250
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.300.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	46.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.150.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.900.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	524.343.750
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	862.500
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18.400.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.200.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	189.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	268.750.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	268.468.440
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	648.157
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	43.063.751
5.1.01.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	450.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.550.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	80.201.652
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	9.043.767
5.1.01.05.11.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	135.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	900.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.391.500
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	9.430.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23.547.506
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.402.085
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	17.947.522
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	747.500
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	27.724.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	7.560.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	46.000
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	22.680.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	999.672.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	399.672.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	399.672.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	67.521.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	67.521.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	67.521.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.857.616.991
5.1.02.01	Belanja Barang	111.869.540.267
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	111.863.307.267
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.781.689.122
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.510.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.464.944.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	299.469.505
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	59.200.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.056.516.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	62.642.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	157.167.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	279.852.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	184.619.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	105.900.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	61.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.500.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	31.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	19.574.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.249.732.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.437.747.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.998.012.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	184.987.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.704.693.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.958.764.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	885.975.500

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.736.566.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	963.475.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	646.119.848
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	21.610.580.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	826.152.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.522.679.392
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.200.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	87.821.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.801.095.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	251.388.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.632.434.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.568.235.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	163.937.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	622.003.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	10.980.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	101.205.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	57.000.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	101.205.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	51.255.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.233.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	783.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	5.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	172.175.359.026
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	126.619.030.252
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.618.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	858.950.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	229.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	50.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	114.880.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	14.940.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	42.900.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	534.100.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.512.404.872
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.139.148.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	60.164.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	160.656.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	217.150.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.547.569.500
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	82.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.693.328.077
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.063.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.824.870.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.882.415.500
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	40.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.905.569.500
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	80.328.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	143.774.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	172.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	151.190.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	469.024.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.600.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	323.669.600
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.275.788.264
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	150.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.162.500
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	26.620.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	532.512.600

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	934.035.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	958.814.233
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	27.761.877.206
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	264.328.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.013.564.900
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	376.741.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	49.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	786.005.500
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	51.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.522.127.050
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	22.680.211.200
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.000.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.481.915.850
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	360.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	13.500.000
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	6.000.000
5.1.02.02.03.0033	Belanja Sewa Tanah Kampung	7.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.314.294.598
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	20.417.098
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	673.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.473.329.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.000.000
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	10.500.000
5.1.02.02.04.0243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	22.038.500
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.950.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	104.060.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.646.300.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.177.500.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	26.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	442.800.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.949.500
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	33.949.500
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.320.105.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	495.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	284.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	20.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	195.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	972.605.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	183.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	70.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.860.780.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	110.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	80.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	390.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	40.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.240.780.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.404.981.590
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.684.344.590
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	477.725.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	242.912.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	360.000.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	300.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	6.000.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	150.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	900.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	66.937.500
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	112.500
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.400.000
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	182.000.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	80.291.036
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.065.912
5.1.02.02.14.0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	27.048.367
5.1.02.02.14.0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	45.000
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	300.000
5.1.02.02.14.0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	420.197
5.1.02.02.14.0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.000.000
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.782.502
5.1.02.02.14.0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.207.658
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.271.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.996.595.358
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.246.490.779
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	3.003.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.275.918.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	675.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	6.000.000
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	2.600.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengujii Kendaraan Bermotor	23.934.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.466.634.401
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.950.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.620.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	3.800.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	263.947.748
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	198.749.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	270.861.630
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7.973.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.199.663.915
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.397.663.915
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	188.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	280.000.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	320.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.541.440.664
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.417.427.487
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	100.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.024.013.177
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39.654.820.550
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.654.820.550
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.289.884.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.626.182.550
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.393.791.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	344.963.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.908.153.790
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.850.600.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.542.600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	20.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.285.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.057.553.790
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.883.475.440
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.174.078.350
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	69.427.398.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	69.427.398.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.825.750.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.825.750.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.825.750.000
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.000.000.000
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.000.000.000
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	81.064.267.600
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	684.807.600
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	684.807.600
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	684.807.600
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.710.196.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46.293.032.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.365.622.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.927.410.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.267.164.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.261.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.006.164.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	19.586.200.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	19.586.200.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	19.586.200.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.083.064.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.083.064.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.083.064.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.532.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.035.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.035.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.035.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.550.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.550.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.550.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.842.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.842.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.842.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	105.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	105.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	105.000.000
5.2	BELANJA MODAL	389.991.280.184
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.887.875.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	4.887.875.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	4.887.875.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	4.017.245.000
5.2.01.01.03.0017	Belanja Modal Tanah Kampung	870.630.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.831.470.298
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.300.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.300.000.000
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	750.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	550.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.309.790.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.278.290.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	950.628.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	275.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	338.150.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	710.000.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.512.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	31.500.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	31.500.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	90.527.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	12.527.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	12.527.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	78.000.000
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	78.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	47.503.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	47.503.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.200.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	9.000.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	28.728.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.575.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.057.648.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.659.051.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	76.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	229.919.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.353.132.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.174.420.300
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.005.041.800
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	20.473.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	547.876.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	66.632.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	520.928.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	13.469.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	224.177.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	68.121.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	156.056.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	96.606.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	53.667.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.893.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19.474.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	19.800.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	42.939.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	42.939.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.769.312.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.711.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.711.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.756.601.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.756.601.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	261.820.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	21.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	21.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	237.824.000
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	173.340.000
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	21.993.000
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	937.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	41.554.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.996.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	2.996.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.500.708.998
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	339.315.200
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	19.216.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	320.099.200
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.161.393.798
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	407.579.600
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.647.749.400
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	69.818.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.246.798
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	7.260.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	7.260.000

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	7.260.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	4.633.499.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4.633.499.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	4.633.499.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	380.144.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	380.144.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	353.774.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	26.370.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.542.102.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.542.102.000
5.2.02.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.542.102.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.834.550.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.834.550.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.834.550.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.326.772.074
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.607.772.074
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.607.772.074
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	135.327.923.886
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	8.167.500
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	752.559.024
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	199.996.560
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.978.115.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.749.842.240
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	288.881.941
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.500.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	60.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.121.856.089
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.620.429.834
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	199.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	199.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.520.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.520.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	7.520.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.462.285.412
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	123.197.832.859
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	111.855.911.873
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	96.276.559.349
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	15.529.744.592
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	49.607.932
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.341.920.986
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.341.920.986
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.887.452.553
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.887.452.553
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.196.566.692
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	690.885.861
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	668.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	70.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	70.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	590.000.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	590.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	8.000.000
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	8.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	9.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	9.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	9.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.700.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.700.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.700.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.482.877.400
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.733.691.900
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.728.081.900
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.728.081.900

KABUPATEN SRAGEN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.610.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	5.610.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.439.185.500
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.439.185.500
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	404.950.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	912.500.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	121.735.500
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	310.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	310.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	310.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	384.718.093.302
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.890.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.870.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.870.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.870.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.020.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.020.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.020.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	379.828.093.302
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	379.828.093.302
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	379.828.093.302
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	49.864.230.000
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	208.127.799.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	121.836.064.302
	Jumlah Belanja	2.477.569.515.980
	Total Surplus/(Defisit)	(315.611.567.304)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.611.567.304
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	276.861.567.304
6.1.01.05	Penghematan Belanja	276.861.567.304
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	276.861.567.304
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	276.861.567.304
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	113.750.000.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	113.750.000.000
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	113.750.000.000
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	113.750.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.611.567.304
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	75.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	75.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	75.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	75.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000
	Pembiayaan Netto	315.611.567.304
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	0

Bupati Sragen

